

MENGUKUHKAN KEMBALI EKSISTENSI PANCASILA DI DUNIA PENDIDIKAN

Oleh:
AGUS MAIMUN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung makna konsekuensi baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif bahwa: (1) Pancasila adalah dasar negara atau filsafat Negara Republik Indonesia; (2) Pancasila adalah norma dasar dan norma tertinggi di dalam negara Republik Indonesia; (3) Pancasila adalah ideologi negara nasional Indonesia; (4) Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional, yang perwujudannya secara melembaga sebagai sistem kenegaraan Pancasila; dan (5) Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup (keyakinan bangsa) yang menjiwai sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia, karena itu Pancasila adalah sistem filsafat Indonesia yang potensial dan fungsional, serta normatif-ideal (Muhammad Noor Syam, 1986: 346).

Senada dengan pemikiran tersebut, KH. Said Aqil Siroj (Ketua PB NU) dalam perayaan Hari Lahirnya Pancasila ke 67 pada tanggal 1 Juni 2012, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu, Pancasila harus dipahami secara substansial, sebagai sumber tata nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan. Banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tata nilai bangsa Indonesia.

Pemikiran luhur tersebut menunjukkan perenungan yang mendalam dari penulisnya, karena dia merasa terpanggil untuk memberikan tafsir yang komprehensif atas Pancasila. Dengan ini diharapkan Pancasila akan tetap menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.

Namun demikian, dalam tataran realitasnya sekarang ini, Pancasila seakan-akan diabaikan sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila tidak lagi menjadi pengikat yang utuh bagi bangsa dalam mendarmabaktikan jiwa dan raganya untuk kedaulatan negara. Hal ini terbukti dengan banyaknya bentrokan antar warga, antar suku, antar agama, antar ideologi, bahkan antar partai politik yang seringkali hanya dipicu oleh persoalan-persoalan kecil yang tidak signifikan. Maraknya tawuran pelajar di berbagai daerah, munculnya kekerasan atas nama agama, dan berbagai demo yang berujung anarkhis hanya persoalan pemilihan kepada daerah (Pilkada). Belum lagi dipertontonkan oleh para politisi kita yang saling caci maki antar pendukung atau elit partai, seakan-akan perilaku demikian absah adanya. Kondisi demikian sangat memprihatinkan kita bersama. Demokrasi Pancasila yang luhur dan agung yang sarat dengan nilai-nilai insaniyah sering kali dimaknai dengan kebebasan berekspresi yang ujungnya adalah caci maki, demonstrasi, dan menurunkan pejabat dari kursi kekuasaan.

Sebagai solusi dari persoalan tersebut, maka saat inilah momen yang paling tetap untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa melalui Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus selalu dikaji, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setulus-tulusnya. Wujud pengamalan itu berangkat dari 5 (lima) sila yang ada pada Pancasila.

Pengamalan sila pertama adalah dengan menjalankan secara sungguh-sungguh perintah agama dan menjauhi larangan-Nya sesuai agama masing-masing, serta selalu menjaga keharmonisan dalam beragama untuk saling hidup berdampingan dan saling hormat-menghormati. Dengan ini diharapkan, kita tidak akan lagi melihat adanya permusuhan karena keyakinan agama yang berbeda, pelarangan pendirian rumah ibadah yang tidak proporsional, apalagi saling bakar-membakar karena merasa agama atau aliran agamanya yang paling benar. Sebab pada dasarnya semua orang ingin damai dan aman, serta tenang dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Sila ke dua memberikan makna bahwa bangsa Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dalam semua dimensi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum, sehingga semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama, tanpa tersekat oleh jabatan, kekuasaan, dan pertemanan. Disamping itu, bangsa kita yang sudah dikenal bangsa yang ramah, sopan, santun, lemah lembut terhadap sesama harus tetap dipupuk dan dipertahankan. Inilah cerminan yang sebenarnya dari wujud sifat manusia yang adil dan beradab.

Sila ke tiga, Persatuan Indonesia terkandung makna bahwa negara merupakan wahana persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen bangsa yang terdiri atas keanekaragaman suku, ras, kelompok, ideologi, dan agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beranekaragam tetapi tetap satu jua, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Sila ke empat memberikan makna bahwa rakyat Indonesia menghendaki agar para pemimpin bangsa ini mempunyai sikap dan perilaku yang bijaksana, artinya segala tindakan dan kebijakannya tidak merugikan rakyat, bahkan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada semua rakyat Indonesia. Disamping itu, rakyat Indonesia menghendaki agar segala persoalan kebangsaan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, bukan penyelesaian yang provokatif dan semena-mena dengan mengesampingkan etika.

Sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa semua warga negara berhak untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran atas kekayaan bangsa ini, sehingga mereka bisa merasakan hidup nyaman dan aman sebagaimana bangsa lainnya yang lebih dahulu menikmati kemakmuran, seperti warga negara tetangga kita Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Implikasinya adalah semua kekayaan negara harus dikelola secara seksama untuk kemakmuran bersama, bukan dikelola oleh pihak asing dan kelompok-kelompok tertentu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Agar Pancasila tidak sekedar sebagai bahan diskusi dan menjadi retorika belaka, maka perlu dibumikan lewat pendidikan. Pendidikan Pancasila di sekolah diharapkan mampu membentuk karakter siswa sebagai bangsa yang bermartabat, sekaligus mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Untuk itu, pembelajaran Pancasila tidak bersifat normatif-doktriner, tetapi lebih bersifat empiris-problem solving. Kalau pembelajaran Pancasila disajikan dengan empiris-problem solving, kita semua yakin, Pancasila akan fungsional dalam kehidupan siswa, sehingga dapat menjadi pedoman hidup mereka dalam berbangsa dan

bernegara. Dengan demikian, perilaku negatif seperti tawuran, bakar-membakar karena sentimen agama, demo anarkhis, dan sebagainya tidak akan pernah terjadi di bumi pertiwi. Kalaupun terjadi, frekuensinya relatif kecil dan tidak banyak menelan kerugian nyawa dan harta. Semoga Pancasila tetap abadi untuk selamanya di bumi pertiwi tercinta. Amiin.